



Determinan Kriminalitas dalam Perspektif Sosial Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2023

Sindy Ayu Wulandari^{1*}, Muhammad Anas²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b300220177@student.ums.ac.id¹, ma912@ums.ac.id²

ABSTRAK

Kriminalitas merupakan indikator penting dalam menilai keamanan dan stabilitas sosial suatu wilayah. Di Indonesia, faktor sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan diduga memengaruhi tingkat kriminalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel tersebut terhadap kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia periode 2018–2023. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Sementara itu, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung diikuti penurunan tingkat kriminalitas, sedangkan peningkatan lulusan SMA justru diikuti kenaikan kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan, memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital, serta mengoptimalkan program kesejahteraan sosial untuk menjaga stabilitas sosial dan menekan angka kriminalitas di Indonesia.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 18 June 2026

First Revised 19 June 2026

Accepted 20 June 2026

First Available online 25 June 2026

Publication Date 25 June 2026

Kata kunci:

Fixed Effects Model, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Kriminalitas, Pendidikan, Pengangguran.

1. PENDAHULUAN

Lonjakan kasus kriminalitas merupakan salah satu masalah besar yang sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, rendahnya tingkat kesejahteraan, serta adanya peluang untuk melakukan kejahatan (Mubarok & Saepudin, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kriminalitas di suatu daerah (Susanti et al., 2025). Menurut Rahmalia et al. (2019), ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan lapangan pekerjaan terbatas, sebagian orang bisa terdorong untuk melakukan tindak melanggar hukum sebagai cara untuk bertahan hidup. Perkembangan jumlah kasus kejahatan (JKK) dan persentase penyelesaian tindak kriminalitas (PPTK) di Indonesia selama periode 2018–2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus kejahatan (JKK) dan Persentase Penyelesaian Tindak Kriminalitas (PPTK) di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	JKK	PPTK
2018	294.281	64,94
2019	269.324	68,17
2020	247.218	71,49
2021	239.481	71,85
2022	327.897	38,12
2023	584.991	51,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan di Indonesia mengalami penurunan pada periode 2018-2021, sementara PPTK mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2022-2023 terjadi lonjakan jumlah kasus kejahatan yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi, seperti kenaikan biaya kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, serta perbedaan pendapatan yang besar sehingga mendorong seseorang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup (Ramandini dan Jaharuddin, 2024). Selain itu, PPTK 2021-2023 menurun sehingga menunjukkan tingkat penyelesaian kasus yang lemah. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan sosial dan ekonomi serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan rasa tidak aman serta berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut Rohman (2016), ketidakseimbangan antara jumlah kasus kejahatan dan tingkat penyelesaiannya menunjukkan adanya berbagai hambatan struktural dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan jumlah penyidik, lemahnya koordinasi antar kepolisian, kurang memadainya sarana dan prasarana penyidikan, serta minimnya bukti pendukung yang menyebabkan kasus sulit dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Susanti et al. (2025) mengatakan bahwa perbedaan pendapatan yang besar membuat kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin terlihat. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil, kecemburuan sosial, dan frustrasi pada kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam kondisi tersebut, kejahatan dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan sosial yang dirasakan. Perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini di Indonesia selama periode 2018–2023 ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indeks Gini di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks Gini
2018	0,386
2019	0,381
2020	0,383
2021	0,382
2022	0,382
2023	0,388

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ketimpangan sempat mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun setelah itu kembali mengalami perubahan pada beberapa tahun berikutnya hingga 2023. Perubahan ini terjadi karena pandemi yang menurunkan pendapatan banyak orang, pemulihan ekonomi yang tidak merata, serta kenaikan harga kebutuhan pokok yang lebih berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan sepanjang periode tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi belum cukup kuat untuk menurunkan ketimpangan secara signifikan. Menurut Kacaribu dan Barika (2025), ketimpangan pendapatan yang besar dapat menimbulkan kesenjangan yang dirasakan masyarakat, sehingga memicu perasaan ketidakpuasan dan rasa tertinggal secara ekonomi. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya konflik sosial dan meningkatkan kecenderungan terjadinya tindakan kriminal. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (PPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2018–2023 ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin (PPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	PPM	TPT
2018	9,74	10,40
2019	9,31	10,21
2020	9,98	12,01
2021	9,92	12,75
2022	9,55	11,69
2023	9,36	10,77

Sumber: BPS

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun kembali meningkat pada 2020 hingga 2021 akibat dampak pandemi *Covid-19* yang melemahkan aktivitas ekonomi, menurunkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pengangguran. Setelah situasi ekonomi mulai pulih, kemiskinan berangsur membaik pada 2022 dan terus menurun hingga 2023. Bagi banyak perusahaan, pandemi *Covid-19* menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan kegiatan operasi secara normal, yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan. Akibatnya, perusahaan menghadapi ancaman tidak mampu membayar beban-beban maupun utang yang mejadi tanggung jawabnya (Herbowo & Saputri, 2023). Ketidakmampuan perusahaan membayar beban dan utang dapat memicu PHK dan penurunan pendapatan, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia relatif stabil pada 2018–2019, kemudian meningkat tajam pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2021 akibat dampak

pandemi yang melemahkan sektor industri dan jasa. Pada 2022–2023, kondisi mulai membaik seiring pemulihan ekonomi dan bertambahnya lapangan kerja. Hal tersebut menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor usaha menjadi kunci utama dalam menekan angka pengangguran. Menurut Hachica dan Triani (2022), tingkat pengangguran yang begitu tinggi mempersulit keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan orang-orang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan utama mereka dan bahkan melakukan kejahatan.

Tindak kriminalitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas sosial dan keamanan suatu wilayah. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran merupakan variabel yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, kestabilan faktor-faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan agar dapat menekan potensi meningkatnya kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2018–2023.

1.2. Tinjauan Pustaka

Armin dan Idris (2020) meneliti pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap jumlah kasus kejahatan di 31 provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM). Hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus kejahatan, sedangkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh. Sementara itu, pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah kasus kejahatan. Rahayu et al. (2025) juga menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, begitu juga pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 15 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan Mervita et al. (2022) yang menemukan bahwa pengangguran dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2021.

Ramadhani dan Rahmi (2024) dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan FEM meneliti pengaruh pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan masing-masing berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Pratita dan Woyanti (2024) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Jawa Timur tahun 2018-2022, begitu juga pendidikan. Namun, hasil berbeda ditemukan pada pengangguran dan kemiskinan, di mana kedua variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sementara itu, kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Simbolon dan Dalimunthe (2026) juga menemukan bahwa pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di kota Medan tahun 2015-2024.

Wicaksono dan Suharto (2023) dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan FEM meneliti pengaruh PDRB, pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan terhadap kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Ditemukan bahwa PDRB dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas, sedangkan kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Namun hasil tersebut tidak sejalan

dengan penelitian Hulu (2024) menunjukkan tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Sementara itu, PDRB berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Meutia et al. (2024) juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sementara pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022.

Susanti et al. (2025) dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model* (REM) meneliti pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas, sedangkan kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Alzahri dan Syafitri (2025) juga menemukan bahwa pengangguran, kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2018-2023. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan Amilia dan Ridwan (2024) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan pengangguran dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022. Sementara itu, tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas.

Wulandari dan Yusnida (2025) meneliti tentang pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap kriminalitas di provinsi Sumatra Barat tahun 2020-2022, dengan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Common Effects Model* (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran masing-masing berpengaruh positif terhadap kriminalitas di provinsi Sumatra Barat periode 2020-2022.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada ukuran variabel independen pendidikan, di mana penelitian ini menggunakan data persentase penduduk yang tamat SMA. Ukuran tersebut lebih baik digunakan dibandingkan rata-rata lama sekolah (RLS) karena menunjukkan pencapaian tingkat pendidikan minimum. Lulusan SMA umumnya telah memiliki kemampuan dasar yang memadai, sehingga lebih relevan dalam menganalisis kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, indikator ini lebih spesifik karena hanya berfokus pada penduduk yang telah mencapai jenjang tertentu, sedangkan RLS hanya menunjukkan rata-rata tahun sekolah tanpa memastikan tingkat kelulusan. Oleh karena itu, variabel penduduk berpendidikan SMA dinilai lebih mampu menggambarkan kualitas pendidikan Masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Pada penelitian ini, data *cross section* mencakup 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* meliputi tahun 2018-2023. Adapun persamaan ekonometrika untuk mengestimasi

pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan terhadap kriminalitas sebagai berikut:

$$\text{LogCRIME}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{GINI}_{it} + \beta_2 \text{POVRATE}_{it} + \beta_3 \text{UNEMPRATE}_{it} + \beta_4 \text{EDUC}_{it} + e_{it}$$

di mana:

<i>CRIME</i>	: Jumlah kasus kejahatan
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien variabel independen
<i>GINI</i>	: Ketimpangan pendapatan (%)
<i>POVRATE</i>	: Persentase penduduk miskin (%)
<i>UNEMPRATE</i>	: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
<i>EDUC</i>	: Penduduk tamat SMA (%)
<i>i</i>	: <i>Cross section</i> (34 provinsi di Indonesia)
<i>t</i>	: <i>Time series</i> (tahun 2018-2023)
<i>e</i>	: Residual

Regresi data panel menggunakan tiga estimasi, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Model terbaik akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap dependen.

Uji eksistensi model atau uji F perlu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independe secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. H_0 pada uji F menyatakan bahwa $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ yang berarti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia. H_0 ditolak apabila probabilitas *F*-statistik $< \alpha$.

Kemudian, uji t juga perlu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. H_0 pada uji t menyatakan bahwa $\beta_i = 0$ ($i = 1-4$), yang berarti setiap variabel ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan masing-masing tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Adapun H_A menyatakan bahwa $\beta_4 < 0$, yang berarti pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan $\beta_j > 0$ ($j = 1-3$), yang berarti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka masing-masing berpengaruh positif terhadap kriminalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi pada model regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Hasil estimasi data panel ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	4,826	9,627	7,500
GINI	6,642	1,258	1,356
POVRATE	0,013	-0,220	-0,022
UNEMPRATE	0,045	-0,012	-0,017

EDUC	0,015	0,017	0,018
R ²	0,155	0,891	0,048
Prob F-stat.	0,000	0,000	0,043
Uji Chow			
(1) Cross-section F (33, 166) = 418,021734; Prob. F = 0,0000			
Uji Hausman			
(2) Cross-section random χ^2 (4) = 16,067666; Prob. χ^2 = 0,0029			

Untuk menentukan model terpilih pada regresi data panel, perlu dilakukan dua pengujian. Pertama, Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Kedua, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara REM dan FEM. Ketentuan dalam Uji Chow adalah apabila probabilitas F -statistik $< \alpha$, maka H_0 ditolak, yang berarti FEM adalah model terbaik untuk digunakan daripada CEM. Sementara itu, ketentuan dalam Uji Hausman adalah apabila probabilitas $\chi^2 < \alpha$, maka H_0 ditolak, sehingga FEM adalah model yang lebih tepat digunakan daripada REM.

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman pada Tabel 4 menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05) dan probabilitas χ^2 sebesar $0,0029 < \alpha$ (0,05), sehingga H_0 ditolak karena keduanya memiliki probabilitas kurang dari α . Dengan demikian, FEM adalah model yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hasil regresi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi FEM

Variabel	Koefisien
C	9,627 (0,000)*
GINI	1,258 (0,684)
POVRATE	-0,220 (0,002)*
UNEMPRATE	-0,012 (0,483)
EDUC	0,017 (0,013)*
R ²	0,891
Prob. F	0,000

Keterangan: Angka di dalam kurung adalah probabilitas t-statistik *signifikan pada α 0,05

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F -statistik sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) sehingga H_0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8911; yang berarti 89,11% perubahan tingkat kriminalitas disebabkan oleh perubahan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan, sedangkan sisanya sebesar 10,89% disebabkan oleh perubahan variabel lain di luar model.

Uji *t* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, sedangkan pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Sementara itu, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 34 provinsi di Indonesia tahun 2018-2023. Ringkasan hasil uji *t* terangkum pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji *t*

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kesimpulan
GINI	1,258	0,684	β_1 tidak signifikan
POVRATE	-0,220	0,002	β_2 signifikan pada α 0,05
UNEMPRATE	-0,013	0,484	β_3 tidak signifikan
EDUC	0,017	0,014	β_4 signifikan pada α 0,05

Koefisien *POVRATE* adalah sebesar -0,220 dengan pola hubungan log-linier, yang berarti tambahan satu persen kemiskinan akan meningkatkan kriminalitas sebesar 22,05 persen. Kemudian, koefisien *EDUC* sebesar 0,017 dengan pola hubungan log-linier berarti tambahan satu persen penduduk yang tamat SMA akan meningkatkan kriminalitas sebesar 1,7 persen. Koefisien *GINI* dan *UNEMPRATE* tidak perlu diinterpretasikan karena tidak signifikan.

Berdasarkan hasil regresi, diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Hal ini dapat terjadi karena daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi, dan kepemilikan barang berharga yang lebih rendah, sehingga peluang dan target kejahatan menjadi lebih sedikit (Sugiharti et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan tindak kriminalitas cenderung menurun karena keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan juga lebih kecil. Selain itu, masyarakat miskin umumnya lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan yang tersedia dibandingkan melakukan tindak kriminal yang memiliki risiko hukum dan sosial (Oktaviani et al., 2026).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Meutia et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022. Penduduk miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena adanya bantuan dari pemerintah, seperti bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan tunai. Adanya bantuan tersebut membuat masyarakat tidak melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Temuan ini juga didukung dengan temuan Pratita dan Woyanti (2024) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022. Simbolon dan Dalimunthe (2026) juga menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di kota Medan tahun 2015-2024. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Ramadhani dan Rahmi (2024), yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Temuan tersebut didukung argument bahwa kemiskinan dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan karena masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disaat kebutuhan hidup bertambah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas.

Variabel independen selanjutnya yang terbukti berpengaruh terhadap kriminalitas adalah pendidikan, di mana hasil regresi menunjukkan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor yang memperparah kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Pendidikan dapat meningkatkan kriminalitas karena semakin tinggi tingkat pendidikan

masyarakat, semakin tinggi pula kemampuan, pengetahuan dan akses terhadap teknologi yang dimiliki. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya jenis kejahatan tertentu, terutama kejahatan modern seperti kejahatan siber (Abah & Agada, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Susanti et al. (2025) bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Pendidikan yang lebih tinggi dapat mendorong seseorang untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam melakukan tindak kriminal dengan cara lebih rapi dan modern. Oleh karena itu, meskipun pendidikan diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, pendidikan justru dapat meningkatkan kriminalitas. Temuan ini juga mendukung dengan temuan Wicaksono dan Suharto (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Amilia dan Ridwan (2024), di mana pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat seseorang kesulitan mencari pekerjaan dan bersaing dengan orang lain yang berpendidikan tinggi, sehingga akan menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas.

Berdasarkan hasil regresi, dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kejahatan hanya tampak ketika perbedaan kondisi di setiap negara tidak diperhatikan atau ketika penelitian hanya menggunakan sedikit negara sebagai sampel. Hubungan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang berbeda di setiap negara, seperti budaya, kondisi sosial, dan karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, belum terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan secara langsung meningkatkan kejahatan (Neumayer, 2005).

Hasil ini mendukung temuan Susanti et al. (2025) bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 32 provinsi di Indonesia tahun 2014-2023. Hal ini dapat terjadi karena ada faktor lain yang mampu mengurangi dampak ketimpangan pendapatan, seperti bantuan sosial dari pemerintah, pembagian pendapatan lebih merata, dan hubungan sosial masyarakat yang masih kuat sehingga konflik sosial dapat ditekan. Namun, Ramadhani dan Rahmi (2024) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas di lima provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Ketimpangan pendapatan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan sosial. Masyarakat yang merasa mengalami kesenjangan ekonomi yang besar dapat terdorong mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan tindak kriminalitas.

Variabel independen selanjutnya yang tidak berpengaruh terhadap kriminalitas adalah pengangguran, di mana ditemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Indonesia tahun 2018-2023. Pengangguran tidak secara langsung dapat memengaruhi kriminalitas karena status menganggur tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi seseorang. Tingkat kejahatan lebih berkaitan dengan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dibandingkan dengan status menganggur (Timbrell, 1990).

Temuan penelitian ini mendukung temuan Mervita et al. (2022) di mana pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2021. Tingginya pengangguran di Indonesia banyak berasal dari lulusan akademi, diploma, dan

universitas. Meskipun demikian, orang yang menganggur tetapi memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung berpikir lebih rasional sehingga tidak mudah melakukan tindak kriminal. Temuan ini juga mendukung temuan Armin dan Idris (2020) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas di 31 provinsi di Indonesia tahun 2013-2017. Namun, hasil ini tidak mendukung temuan Amilia dan Ridwan (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas. Pengangguran dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga sebagian individu dapat terdorong melakukan tindakan kriminal. Tingginya pengangguran juga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang berpotensi meningkatkan kriminalitas di Provinsi Bengkulu tahun 2018-2022.

4. KESIMPULAN

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia periode 2018–2023 menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effects Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, yang mengindikasikan bahwa tingginya kemiskinan tidak selalu diikuti peningkatan kriminalitas karena adanya fokus masyarakat pada pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan bantuan sosial. Pendidikan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, diduga terkait meningkatnya kejahatan berbasis teknologi seiring bertambahnya penduduk berpendidikan SMA. Sementara itu, ketimpangan pendapatan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah diharapkan memperkuat program perlindungan sosial, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan yang disertai pendidikan karakter dan literasi digital, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja agar kondisi sosial tetap aman dan kondusif.

5. REFERENCES

- Abah, J. A., & Agada, P. I. (2025). Students' vulnerability to cybercrime: implications for cybersecurity in the global south. *International Journal of Didactic Mathematics in Distance Education*, 2(2), 141–164. <https://doi.org/10.33830/ijdmde.v2i2.11869>
- Alzahri, M. D., & Syafitri, W. (2025). The effects of unemployment, poverty, education, and income disparity on crime rate in west Sumatra. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.21776/jdess.2025.04.2.20>
- Amilia, D., & Ridwan, P. (2024). Analisis tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di provinsi Bengkulu. *Jurnal pendidikan Indonesia* 5(12), 1594–1607. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/6319>
- Armin, F., & Idris. (2020). Analysis of the effects of education, unemployment, poverty, and income inequality on crime in Indonesia. *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting* (hal. 368-374). PICEEBA2.

<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.092>

- Carboni, O. A., & Detotto, C. (2016). The economic consequences of crime in Italy. *Journal of Economic Studies*, 43(1), 122–140. <https://doi.org/10.1108/JES-07-2014-0121>
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1),63. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains/article/view/118148>
- Herbowo, H., & Saputri, E. R. (2023). Pengujian rasio keuangan terhadap financial distress: Bukti di Indonesia. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 26(1), 1-15. <https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana/article/view/805>
- Hulu, D. M. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kriminalitas di Indonesia dengan regresi data panel pada tahun 2016-2020. *Jurnal: Indonesian Council of Premier Statistical Science*, 3(2), 37-44. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/icopsic/article/view/32237>
- Kacaribu, A. F., & Barika. (2025). Pengaruh kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(5), 1508 –1520. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/7131>
- Mervita, E., Eviatun, E., Hasan, S., Hasanuddin, H., & Sari, R. R. (2022). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap tindakan kriminal di Kabupaten Lampung Utara Periode 2012-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 665-672. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2206>
- Meutia, R., Amri, K., & Indah. (2025). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 54–70. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/6509>
- Mubarok, M.I.G., & Saepudin, T. (2023). Analisis pengaruh indikator sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas: Studi Pada 13 Kota Besar di Indonesia Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 101–117. <https://jrie.feb.unpas.ac.id/index.php/jrie/article/view/68>
- Neumayer, E. (2005). Ketidaksetaraan dan kejahatan kekerasan: Bukti dari data perampokan dan pencurian dengan kekerasan. *Jurnal penelitian perdamaian*, 42 (1), 101-112. <https://doi.org/10.1177/0022343305049669>
- Oktaviani, V. R., Syarif, A. H., & Setyanto, A. R. (2026). The Effect of Poverty Levels, Open Unemployment Rates on Crime Rates in Indonesia 2014-2024: a VECM Approach. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 6(3), 440-448. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/2593>
- Pratita, K. D., & Woyanti, N. (2024). Analisis pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 62-70. <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/jeppupr/article/view/16551>
- Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan

- kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 21-36. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/5345>
- Rahayu, A., Husein, R., & Junanda, R. (2025). The effect of economic growth, unemployment, population, and poverty on crime in Indonesia. *Proceedings of International Conference on Finance Economics and Business* (hal. 1-18). ICOFEB. <https://proceedings.unimal.ac.id/icofeb/article/view/1291>
- Ramadhani, A. Z & Rahmi, D. (2024). Pengaruh pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan terhadap jumlah kriminalitas di 5 provinsi tertinggi Indonesia. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(3), 665–675. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSES/article/view/13347>
- Ramandini, N., & Jaharuddin, J. (2024). Krisis ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi: pembelajaran dari resesi global 2020 dan strategi untuk membangun kembali. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4554-4565. <https://al-haramjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/4471>
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Jurnal Perspektif*, 21(2), 125. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/187>
- Septaria, R., & Zulfarisatuyaqin, S.M (2021). Tingkat kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan pendekatan ekonomi. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4 (1), 50–64. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2188>
- Simbolon, S. A. R., & Dalimunthe, M. B. (2026). Analisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan disparitas pendapatan terhadap kriminalitas di kota medan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(4), 1020-1028. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/24573>
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The nexus between crime rates, poverty, and income inequality: A case study of Indonesia. *Economies*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>
- Susanti, S. T., Ananta, P., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesian. *Indonesia Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(6), 1794–1801. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1341>
- Timbrell, M. (1990). Does unemployment lead to crime?. *Journal of interdisciplinary economics*, 3(3), 223-242. <https://doi.org/10.1177/02601079X9000300305>
- Wulandari, Y., & Yusnida,. (2025). Pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, dan pengangguran terhadap kriminalitas di provinsi Sumatra Barat. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 2015-2024. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1417>
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 50–57. <https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/29798>.

